



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 20 Agustus 2021

Halaman: 2

Kelurahan Peroleh Tambahan Anggaran

YOGYA (KR) - Kelurahan di wilayah Kota Yogya dipastikan akan memperoleh tambahan anggaran dari Dana Keistimewaan. Alokasinya bervariasi antara Rp 50 juta hingga Rp 75 juta tiap kelurahan. Tambahan anggaran tersebut untuk mendukung program penanganan Covid-19 yang ada di wilayah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogya Taokhid, mengungkapkan proposal dari seluruh kelurahan sudah disampaikan ke DIY. "Dana yang akan diterima oleh tiap kelurahan bisa berbeda-beda. Ada ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pemda DIY," jelasnya, Kamis (19/8).

Ketentuan pemberian tambahan anggaran tersebut di antaranya adalah pelaksanaan program Jaga Warga. Kelurahan dengan lebih dari 50 persen kam-

pung sudah memiliki Jaga Warga berhak menerima bantuan Rp 75 juta. Sedangkan kelurahan dengan kurang dari 50 persen kampung memiliki Jaga Warga, akan mendapat bantuan Rp 50 juta. Hal ini karena tambahan anggaran tersebut melalui jalur program Jaga Warga.

Agar penyaluran bantuan dari Dana Keistimewaan tersebut bisa dilakukan lebih cepat maka anggaran masuk dalam pos biaya tidak terduga (BTT) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY. Sedangkan

kuasa pengguna anggaran oleh Sat Pol PP DIY.

Taokhid menambahkan, kelurahan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya mulai dari kegiatan pencegahan, penanganan hingga pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi. "Bisa digunakan untuk pengadaan disinfektan dan alat pelindung diri untuk penyemprotan di wilayah. Atau bisa digunakan membeli sembako yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak," imbuhnya.



Noviar Rahmad

Di samping itu juga bisa untuk penguatan Tim Kubur Cepat (TKC) maupun penguatan program Jaga Warga. Khusus untuk pembelian sembako, Taokhid menyebut, kelurahan harus benar-benar cermat dan teliti agar tidak terjadi duplikasi penerima bantuan sembako. Hal ini karena pe-

merintah juga sudah memiliki program yang sama.

Sebelumnya Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, mengatakan penyusunan program penanganan Covid-19 dengan memanfaatkan Dana Keistimewaan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing kelurahan. Sehingga dimungkinkan program antar kelurahan tidak sama. "Yang paling penting adalah harus ada programnya terlebih dulu sehingga pelaksanaan pun bisa terarah dan nantinya penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY terus mengintensifkan koordinasi dengan Kelurahan, supaya pencairan dana keistimewaan

(Danais) untuk penanganan Covid-19 bisa segera dilakukan. Pasalnya sampai Kamis (19/8), baru ada 108 Kelurahan di DIY yang sudah siap untuk mencairkan karena sudah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Adapun berkas yang sudah lengkap dari 392 kelurahan, baru 229 yang berkasnya dinyatakan lengkap.

"Pemda DIY mengalokasikan anggaran dari Danais sebesar Rp 22,6 Miliar bagi 392 Kelurahan di DIY untuk penanganan Covid-19. Namun sampai Kamis (19/8) baru ada 108 Kelurahan yang sudah siap mencairkan Danais. Rata-rata kelurahan mengalami kendala dalam proses administrasi," kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad di Kompleks Kepatihan, Kamis (19/8).

Dikatakan, masih adanya beberapa Kelurahan yang belum bisa mencairkan Danais untuk penanganan Covid-19 karena ada yang ragu dan mengalami kendala administrasi. Hal itu terjadi karena kelurahan harus melampirkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Kelurahan (APBKal).

Dalam mengurus dokumen tersebut, justru banyak kelurahan yang mengurus perubahan APBKal dimana prosesnya harus rapat terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPKal). Padahal sebetulnya yang diminta itu hanya perubahan penjabaran APBKal cukup dengan keputusan lurah sudah selesai. Setelah itu baru dibicarakan dengan BPKal. (Dhi/Ria)-f

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

Ditanggapi
Diketahui
Pers

MM
005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005